

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Suatu daerah atau desa pasti memiliki potensi daerah masing-masing dan itu bisa menjadi peluang bagi desa selain untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa, serta masyarakat desa lebih dapat memajukan desa itu sendiri dengan cara memperkenalkan produk atau hasil kinerja desa melalui badan usaha milik desa untuk diperkenalkan kemasyarakat luar, dan ini berpotensi sangat baik untuk pertumbuhan desa, selain itu bukan hanya potensi dan kinerja bumdes saja tapi juga harus memperhatikan bagaimana kondisi laporan keuangan bumdes yang juga menunjukkan kondisi BUMDes dilihat dari laporan posisi keuangan, karena dalam pencatat laporan keuangan sudah ada sejak abad ke-12 yang dimana di ada dalam teori oleh Luca Pacioli yang menjelaskan sejak saat itu pencatat setiap aktivitas yang berhubungan dengan nilai barang harus dicatat. Dalam penjelasa (Ayuningsih, 2012) ciri-ciri mendasar sistem akuntansi yang di kemukakan Luca Pacioli adalah system brpasangan yang dimana pencatatan dalam dua aspek yaitu kredit dan debit, sehingga dalam pencatat laporan keuangan dapat diperoleh dari hasil pencatatan yang sistematis dan mudah dikontrol. Dalam hal ini Kriegesmann dan Kley (2007) juga menyatakan rangka untuk keberhasilan suatu entitas harus memiliki keberhasilan dalam kopetisi untuk menciptakan inovasi, suatu organisasi atau entitas harus memperbaiki dan mempelajari dan juga melakukan perubahan untuk sebuah visi pengetahuan yang lebih kreatif.

Alasan laporan keuangan harus di sajikan secara transparan agar pihak eksternal juga dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan desa agar setiap keputusan yang diambil dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka dan masyarakat juga dapat memahaminya. Dalam hal ini di teori Karl Mark yang membahas tentang teori matrealialitas juga berpengaruh terhadap kondisi bagaimana agar desa dapat saling berkerjasama dan tidak adanya perbeda-bedaan antara status sosial serta juga dapat menentukan cara bagaimana masyarakat desa dapat berinteraksi dengan lingkungan Pamungkas (2016). Dalam penelitian ini diharapkan bumdes bukan hanya memikirkan bagaimana pencapaian profit yang menguntungkan laba bagi desa tetapi juga tidak membeda-bedakan status sosial yang ada di desa serta harus memperkuat jalin sosial yang ada, seperti yang di jelaskan di teori Karl Mark dalam hubungan sosial perubahan sosial bukan berasal dari individu, tetapi kelas-kelas sosial (id.wikipedia.org). Dalam penelitian Ilegbinosa (2012) Karl Mark tidak setuju dengan prinsip kapitalisme, yang menciptakan kondisi kerja yang dilihat sebagai tidak adil dan ingin mngganti dengan metod yang berbeda dari produksi dan sosial organisasi melalu revolusi, yang sosialisme. Maka dalam teori ini diharapkan masyarakat desa memiliki kesadaran serta moralitas, bukan mementingkan kedudukan masing-masing. Dengan di terapkannya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau di sebut dengan SAK ETAP ini akan mempermudah suatu instasi melakukan pencatatan laporan keuangan dan juga berguna untuk semua pihak dan juga mempermudah untuk berkelanjutan dimasa depan yang lebih baik.

1. Otonomi daerah

Otonomi daerah merupakan sistem dari bagian politik yang di harapkan memberikan peluang untuk masyarakat Indonesia yang memberikan hak dan kewajiban dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkeaktifitas berdasarkan keahlian setiap masing-masing individu. Masyarakat akan kesulitan dalam menempatkan diri jika tanpa otonomi daerah karena masyarakat harus sejajar dengan manusia lainnya dari berbagai Negara pada saat mulai berlakunya perdagangan bebas. Dalam penelitian Ramadana dan Ribawanto (2013) juga menyatakan otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri, selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom merupakan kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batas wewenang daerah tertentu dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat menurut prakasa sendiri bedasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Ksatuan Republik Indonesia.

2. Otonomi Desa

Menurut Ramadana dan Ribawanto (2013) Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, yang dapat menentukan susunan pemerintahan dalam mengatur serta mengurus rumah tangga, dan memiliki kekayaan dan asset, jadi eksistensi desa perlu diberi ketegasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Diharapkan masyarakat dapat mandiri dengan menggunakan hak otonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi desa itu secara umum merupakan otonomi asli dan utuh jadi bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah yang berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki susunan asli serta hak istimewa, Desa memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional maupun yang berada didaerah kabupaten.

3. Desa

Menurut Ramadana dan Ribawanto (2013) Desa menurut “PP No 72/2005 adalah kesatuan hukum masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, dan yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Kemudian mengalami perubahan menjadi Permendagri 39 tahun 2010 bab I tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan: “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwnang dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa, berdasarkan asl-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Secara umum desa merupakan sutau daerah yang terdapat beberapa unit kelompok kepala keluarga yang ada di suatu daerah yang juga memiliki hak otonomi desa yang menjadikan masyarakat desanya menjadi desa yang mandiri dengan menggunakan potensi desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Sedangkan Menurut Ridwan (2017) menyatakan desa merupakan salah satu basis dan sumber usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan desa diharapkan tidak hanya dapat menggerakkan masyarakat untuk keikutsertaan dalam pembangunan, tapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan dalam administrasi desa dengan baik, dan juga mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

4. Pemerintah desa

Menurut Ramadana dan Ribawanto (2013) Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, menyinggung tentang pemerintahan desa, yang secara spesifik diatur dalam “Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 2005 tentang desa sebagai aturan pelaksanaan pelaksanaan dari UU No 32 Tahun 2004”. Kemudian pada Permendagri nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa menyatakan pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa dengan nama lainnya adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa dalam permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa Ramadana dan Ribawanto (2013), mengemukakan bahwa “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai aktivitas usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Keberadaan badan usaha milik desa diharapkan dapat meningkatkan potensi tenaga kerja yang produktif bagi desa. Mungkin salah satu caranya untuk meningkatkan tenaga kerja yang produktif dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan yang tujuannya untuk memberikan bekal agar usaha yang akan dibangun di desa memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat desanya. Dan juga diharapkan kegiatan yang ada di badan usaha milik desa dapat memberikan manfaat

untuk upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa, dengan adanya sumber daya manusia pada pengembangan badan usaha milik desa akan menjadi tolak ukur keberhasilan usaha yang dibangun dan juga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerahnya.

Pendirian bumdes sangat berpengaruh untuk pembangunan desa yang dapat ditingkatkan melalui potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Mandira dan Atmadja (2014) yang mencakup pembangunan infrastruktur pedesaan serta pengembangan usaha ekonomi produktif di perdesaan dan prioritas utama pendirian bumdes ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa bisa terbantu dengan adanya bumdes ini, serta meningkatkan peran desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembentukan badan usaha milik desa juga harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan keadaan desa seperti yang dinyatakan oleh Prabowo (2017) yang menyatakan bumdes harus memiliki prinsip-prinsip sesuai dengan keadaan desanya seperti prinsip pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, serta demokrasi dengan tujuan mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga desa juga membutuhkan peran dari masyarakat itu sendiri untuk menjalankan dan mengembangkan kemandirian desa dan juga berkesinambungan dengan mempertimbangkan dan potensi usaha ekonomi desa dan juga jenis unit usaha masyarakat desa.

Pada Permendesdesa nomor 4 tahun 2015 bagian kedua tentang Organisasi Pengelola BUMDesa pada pasal 12 yang menyatakan

- a. Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola bumdes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud berkewajiban:
 - 1) Melaksanakan dan mengembangkan bumdes agar menjadi lembaga masyarakat desa.
 - 2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
 - 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perkonomian desa lainnya.
- c. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud berwenang:
 - 1) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha bumdes setiap bulan
 - 2) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha bumdes setiap bulan
 - 3) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha bumdes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dengan adanya bumdes masyarakat desa juga akan lebih mengenal potensi yang desa miliki, tapi terkadang masyarakat desa cenderung hanya berfokus dengan penghasilan yang didapat dengan hasil mereka sendiri sedangkan dengan adanya bumdes bukan hanya untuk masyarakat desa saja yang akan menerima keuntungannya tetapi masyarakat yang ada di luar desa dapat merasakan juga hasil dari kinerja desa dan dapat memperkenalkan hasil desa tersebut keluar desa atau dengan adanya teknologi yang semakin canggih dari tahun ketahun akan lebih mempermudah masyarakat lain yang ada di luar mudah mengenal bumdes tersebut.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas tentang badan usaha milik desa panggung lestari yang ada di desa panggungharjo ini memiliki beberapa usaha yang sudah berjalan sejak tahun 2013 salah satunya sekolah desa yang digunakan untuk pedagang-pedagang desa, rest area, RTS yang mengelola sampah rumah tangga, dan pengelolaan minyak jelantah. Dari beberapa usaha yang dijalani oleh bumdes panggung lestari usaha yang paling berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi bumdes adalah rest area yang ada di jalan Matraman, pencapaian sampai September kemarin untuk tahun ini sudah mencapai 3,8 M. Jadi dapat dikatakan bumdes panggung lestari sudah berkembang dengan baik dan diharapkan akan memberikan hasil yang dapat memajukan desa.

6. Pengertian laporan keuangan

Komite standar akuntansi memulai revisi utama dalam prinsip-prinsip akuntansi dengan mengumumkan pernyataan dan akan mengeluarkan standar akuntansi interpretasi tambahan (Yusrina dan Mukhtaruddin,2017). Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) mengemukakan pengertian laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Umumnya prinsip standar akuntansi relatif terbuka untuk penilaian yang terbuka untuk umum. standar yang memiliki peraturan di sisi lain memberikan sedikitnya penilaian professional (Mukhlisin, 2017).

Pernyataan lain tentang laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses perhitungan dan pencatatan dari ringkasan dan hasil akhir dari transaksi keuangan selama periode tertentu. Dan laporan yang keuangan yang akan disajikan harus secara jelas untuk disampaikan dan mengacu pada standar akuntansi yang sudah ditetapkan Rudini dan Nurhayati (2011). Secara umum laporan keuangan berisi dari neraca, dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Kuswandi (2009) menyatakan dapat dikatakan

laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses akuntansi selama satu periode atau satu tahun pencatatan yang bersangkutan yang digunakan sbagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktvitas sutau perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data ataupun aktivitas yang ada di perusahaan.

Laporan keuangan memiliki tujuan yang digunakan sebagai alat uji pekerjaan untuk bagian akuntansi atau pembukuan tetapi dalam perkembangan laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar dalam penentuan nilai posisi keuangan dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) tujuan laporan keuangan sebenarnya untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu prusahaan yang manfaatnya bagi sejumlah pemakai dalam pengambil keputusan. Laporan kuangan juga digunakan sbagai perbandingan untuk menilai dampak dari keuangan yang akan muncul dari keputusan ekonomis yang diputuskan. Mengenai informasi dari dampak keuangan yang ada sangat bermanfaat untuk pengguna dalam perbandingan nilai keuangan. Laporan keuangan juga menggambarkan bagaimana kondisi suatu perusahaa dengan kualitas laporan kita dapat mlihat kondisi perkembangan perusahaan ataupun jenis usaha lainnya apabila kualitas laporan baik maka bias dikatakan dalam pencatatan laporan keuangan suatu perusahaan sudah memenuhi kriteria yang baik untuk memudahkan suatu perusahaan mengambil keputusan.

7. Karakteristik laporan keuangan

Menurut Rudini dan Nurhayati (2011) menyatakan Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), laporan keuangan yang bermanfaat untuk pengguna informasi merupakan keharusan terdapat empat karakteristik yang akan di perbandingkan

a. Dapat diPahami

Kualitas laporan keuangan yang dibuat harus mempermudah pembaca agar dengan mudah di pahami pengguna, karna pengguna memiliki pengetahuan yang memadai, jadi informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus kompleks.

b. Relevan

Informasi laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan jadi informasi yang disajikan harus relevan. Informasi laporan keuangan yang disajikan harus memiliki kualitas untuk mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi masa lalu, masa kini dan masa depan dan penegasannya harus berkaitan satu sama lain.

c. Keandalan

Informasi laporan keuangan harus memiliki kualitas andal apabila bebas dari pengertian yang menjerumuskan, material, dan dapat diandalkan penggunaanya sbagai penyajian yang secara wajar dapat disajikan.

d. Dapat dibandingkan

Pengguna laporan keuangan dapat membandingkan kualitas laporan keuangan antara periode yang secara keseluruhan berkecenderungan posisinya dan kinerja keuangannya. Dalam pengvaluasian laporan keuangan posisi keuangan juga harus secara relatif.

8. Jenis laporan keuangan

Menurut Senoaji dan Cahyonowati (2014) Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri:

- a. Neraca, merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut.
- b. Laporan laba rugi, menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas.
- c. Laporan perubahan ekuitas, seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.
- d. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan juga mencatat atau menyajikan semua rincian jumlah dari setiap aktivitas suatu perusahaan.

9. Pengertian SAK ETAP

Standar akuntansi keuangan merupakan suatu rangkaian tata cara pembuatan laporan keuangan untuk keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia sudah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), berlaku secara efektif dalam penyusunan laporan keuangan yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2011.

SAK yang berbasis IFRS ditunjuk untuk entitas yang memiliki tanggung jawab publik. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) memberikan kemudahan dengan ketentuan pelaporan keuangan yang lebih kompleks. Ruang lingkup Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) juga digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud sebagai entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan penerbitan laporan keuangan untuk pengguna eksternal untuk memenuhi tujuan umum.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu Huvat, (2015) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP 2009).

Selain itu laporan keuangan juga memiliki tujuan memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan maupun kinerja suatu perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga dapat melihat hasil kinerja manajemen suatu perusahaan dan bagaimana pertanggung jawaban sumber daya yang dipercayakan kepada suatu manajemen. Laporan keuangan juga menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Bukan hanya itu dengan adanya SAK ETAP transaksi ataupun kejadian lain harus dapat di pertanggung jawabkan dengan dan disajikan sesuai dengan realitas kejadian atau segala aktivitas yang ada di suatu perusahaan.

Menurut Huvat (2015) SAK-ETAP (2009) “Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:
 - 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
 - 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi”.

Pada penelitian Hendrian (2013) berpendapat Tujuan dari penyusunan SAK-ETAP bukan hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang belum go public, tetapi juga membantu melatih perusahaan sejak dini agar lebih baik dalam mempersiapkan laporan keuangan kedepannya ketika go public.